

Daftar Isi

No.	Judul Berita	Media Sumber	Page
1.	UU Minerba Baru Terbit, Tambang Bermasalah Diambil ke Negara	neraca.co.id	2
2.	Smelter Bisa Beroperasi Juni, Prabowo Setuju Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga	rmol.id	4
3.	Darma Henwa (DEWA) Terbitkan Saham Baru: Potensi Raup Rp1,41 Triliun	ekonomi.bisnis.com	6
4.	Hanya Freeport yang Dipastikan Dapat Izin Ekspor Konsentrat Lagi	kabarbursa.com	9
5.	Harga Batu Bara China Terus Merosot, Raksasa Pertambangan Terpaksa Pangkas Produksi	investor.id/business	12
6.	Koperasi Diizinkan Kelola Tambang	cnbcindonesia.com	14

UU Minerba Baru Terbit, Tambang Bermasalah Diambil ke Negara

PEMERINTAH akan mengambil langkah tegas khususnya pada pertambangan mineral dan batu bara (minerba) yang dinilai 'bermasalah'. Dengan terbitnya Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang baru, pemerintah akan mengambil Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, menyusul ditetapkan UU Minerba yang baru, sejatinya pertambangan mineral di Indonesia adalah sepenuhnya milik negara. Dia mengatakan, jika ada pertambangan yang saat ini masih 'bermasalah' termasuk IUP yang tumpang tindih hingga IUP yang terjebak dalam pengadilan, maka akan dikembalikan pada negara.

"Bagi seluruh IUP yang tumpang tindih, yang sekarang kalian (pengusaha tambang) masih terjebak di pengadilan dan macam-macam. Dengan berlakunya Undang-undang (Minerba) ini, maka semua (IUP bermasalah) dikembalikan kepada negara," tegas Bahlil dalam acara Indonesia Economic Summit, di Jakarta, dikutip Kamis (20/2/2025).

Dia mengungkapkan, IUP yang hingga saat ini masih mengalami permasalahan justru menghambat proses produksinya. Bahlil menilai, lebih baik, IUP yang bermasalah tersebut dikembalikan dan diurus oleh negara saja.

"Negara memberikan konsesi ini kepada teman-teman pengusaha untuk menjalankan. Tapi apa yang terjadi? Sesama teman-teman ini berebut pada koordinat yang sama, pada wilayah yang sama. Akhirnya 10 tahun gak jalan-jalan itu barang, 5 tahun gak jalan-jalan itu barang. Ini merebutkan barang negara," katanya.

Imbasnya, kata Bahlil, tidak kunjung dikerjakannya IUP yang diperebutkan tersebut membuat negara kehilangan potensi pendapatan selama bertahun-tahun.

Dengan begitu, Bahlil menegaskan negara akan mengambil alih IUP yang tidak kunjung dikerjakan untuk bisa ditata ulang oleh negara.

"Daripada begitu, sudah, kita ambil alih, negara saja biar negara tata dengan baik. Supaya tidak ada yang ribut-ribut semuanya dilakukan dengan baik," tutupnya. (pgr/pgr)

Sumber: cnbcindonesia.com

Smelter Bisa Beroperasi Juni, Prabowo Setuju Freeport Ekspor Konsentrat Tembaga

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) telah berkomitmen merampungkan perbaikan fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) tembaga terbarunya pada Juni 2025 mendatang.

Hal itu disebabkan kejadian kebakaran pada smelter tembaga PTFI di Gresik, Jawa Timur pada Oktober 2024 lalu.

“*Alhamdulillah* kemarin kita sudah memutuskan dengan jalan tengah bahwa pabrik itu akan selesai di bulan Juni (2025) dan Freeport sudah membuat pernyataan dan laporan dari polisi maupun dari asuransi juga sudah ada,” kata Bahlil di Jakarta, dikutip pada Kamis (20/2/2025).

Bahlil juga menyebut pemerintah akan kembali menerbitkan surat izin ekspor tembaga mentah untuk Freeport usai tertahan sejak Desember lalu. Meski ia belum menyebutkan sampai kapan keran ekspor diizinkan negara.

Menurut Bahlil, keputusan tersebut merupakan hasil persetujuan dari rapat terbatas (Ratas) yang digelar Presiden Prabowo Subianto pada awal minggu ini bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Kementerian terkait.

“Kemarin kita sudah melakukan ratas dipimpin oleh Bapak Presiden Dan kemudian kita mencari alternatif *win-win*. *Win-win*-nya adalah bagaimana agar produksi daripada Freeport tetap berjalan,” ucap Bahlil.

Dia menjelaskan, alasan pemerintah mengizinkan ekspor tembaga kendati sebelumnya sudah ada aturan soal pembatasan ekspor tembaga mentah adalah pendapatan Freeport yang menurun. Ia menyebut bagaimanapun 50% saham Freeport merupakan milik negara.

Ancaman PHK dan Hukuman bagi Freeport

Dengan kata lain, apabila pendapatan Freeport menurun maka penerimaan negara juga berkurang. Selain itu, Bahlil mengatakan ada ribuan karyawan yang berpotensi dirumahkan jika Freeport tak

kunjung bisa ekspor.

“Karena kalau *enggak* nanti karyawan puluhan ribu itu akan dirumahkan,” tuturnya.

Meski demikian, pemerintah tetap memberikan sanksi kepada Freeport karena masih mengekspor tembaga kendati jatah eskpornya telah habis di 2024. “Sanksinya adalah pajak eskpornya kita naikkan. Jadi dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” ujar Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2023, izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia sudah selesai pada 31 Desember 2024 lalu. Dengan keputusan tersebut mereka tak bisa lagi mengekspor bahan mentah tembaga di tahun ini.

Namun, pada saat bersamaan, smelter Freeport mengalami kebakaran, sehingga operasional pengolahan konsentrat tembaga terhenti.

Di sisi lain, penyimpanan konsentrat juga mengalami over kapasitas sementara izin tak kunjung keluar. Kondisi ini membuat Freeport harus mengurangi produksi mereka dan secara otomatis menurunkan pendapatan yang berimbas pada penerimaan negara sekaligus para pekerja di sana.

Editor: Prisma Ardianto

Sumber: investor.id/business

Darma Henwa (DEWA) Terbitkan Saham Baru: Potensi Raup Rp1,41 Triliun

PT DARMA Henwa Tbk (DEWA) mengumumkan rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan menerbitkan 18.833.700.452 saham biasa Seri B, masing-masing bernilai nominal Rp50 per saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi, saham baru tersebut akan diambil oleh tiga perusahaan, yakni PT Madhani Talatah Nusantara, PT Andhesti Tungkas Pratama, dan PT Antareja Mahada Makmur. Perseroan menegaskan bahwa ketiga entitas ini tidak memiliki keterkaitan afiliasi dengan DEWA.

Dengan terealisasinya PMTHMETD, total modal ditempatkan dan disetor penuh DEWA akan meningkat menjadi 40.687.434.244 saham, dengan nilai mencapai Rp3.127,06 miliar. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan perusahaan guna mendukung ekspansi bisnis ke depan.

Rencana ini telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 13 Februari 2025. Harga pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp75 per saham, sesuai dengan ketentuan BEI mengenai penetapan harga efek.

Pengumuman ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga transparansi informasi kepada para pemegang saham, sebagaimana sebelumnya telah disampaikan dalam pengumuman tertanggal 30 Desember 2024 dan 11 Februari 2025.

Jadwal pelaksanaan PMTHMETD ditetapkan sebagai berikut:

- Penerbitan dan distribusi saham baru: 26 Februari 2025
- Pencatatan saham di BEI: 27 Februari 2025
- Pengumuman hasil PMTHMETD: 3 Maret 2025

Konsekuensi Private Placement

Namun, langkah itu tidak tanpa konsekuensi bagi pemegang saham lama. Perseroan menyebutkan, pemegang saham lama akan mengalami dilusi signifikan hingga 45,53 persen. Di sisi lain, para kreditur akan menjadi pemilik saham mayoritas baru dalam perusahaan.

Madhani Talatah Nusantara diproyeksikan memegang 27,64 persen saham, sedangkan PT Andhesti Tungkas Pratama menguasai 17,89 persen. Sementara itu, porsi kepemilikan Goldwave Capital Limited sebagai pemegang saham lama akan terpangkas dari 17,46 persen menjadi hanya 9,51 persen.

Meski demikian, DEWA memastikan bahwa tidak terjadi perubahan dalam pemegang saham pengendali. Aksi korporasi ini juga mencerminkan upaya perusahaan untuk tetap menjaga posisi kompetitif di industri tambang dengan memperkuat pondasi finansialnya.

Perseroan telah menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 13 Februari 2025 sebagai langkah awal untuk mendapatkan persetujuan para pemegang saham atas rencana tersebut.

Dengan langkah ini, DEWA menunjukkan komitmen dalam memperbaiki kinerja keuangannya di tengah tantangan industri. Konversi utang menjadi ekuitas diharapkan tidak hanya menurunkan tekanan keuangan tetapi juga membuka peluang baru untuk ekspansi dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

Sementara itu, analis Stockbit Sekuritas Hendriko Gani, berpendapat dengan pelaksanaan harga saham pada level Rp65, jauh lebih rendah dibandingkan harga penutupan pada akhir tahun 2024 di level Rp111, langkah ini diperkirakan akan memberikan tekanan pada sentimen pasar dalam jangka pendek.

Diskon harga sebesar 41,4 persen menjadi salah satu isu yang berpotensi menimbulkan reaksi negatif dari pemegang saham eksisting, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap nilai kepemilikan mereka.

Meski demikian, konversi utang ini juga membawa harapan jangka panjang bagi Darma Henwa. Selain mengurangi beban utang, kehadiran pemegang saham baru diharapkan mampu mendukung

pertumbuhan perusahaan di masa mendatang, baik melalui pengalaman maupun jaringan bisnis mereka.

Saham DEWA Stabil di Rp145

Darma Henwa alias DEWA mencatat pergerakan harga saham yang stabil di level Rp145 pada penutupan perdagangan Kamis, 20 Februari 2025. Saham emiten jasa pertambangan ini tidak mengalami perubahan nilai dibandingkan hari sebelumnya, dengan volume perdagangan mencapai 1,18 miliar saham dan rata-rata volume 409,26 juta saham.

Sepanjang sesi perdagangan, saham DEWA sempat menyentuh level tertinggi di Rp156 dan terendah di Rp140. Adapun nilai transaksi saham tercatat sebesar Rp176,1 miliar dengan frekuensi perdagangan mencapai 16.398 kali.

Investor asing mencatatkan aksi beli senilai Rp22,6 miliar, sementara aksi jual asing mencapai Rp29,2 miliar. Dalam sepekan terakhir, saham DEWA mengalami kenaikan signifikan sebesar 22,88 persen. Sementara secara year-to-date (YTD), saham ini telah menguat 30,63 persen.

Dengan pergerakan harga yang positif dalam beberapa pekan terakhir, saham DEWA terus menjadi perhatian investor, terutama setelah perseroan mengumumkan rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHEMTE). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan perusahaan dalam mendukung ekspansi bisnisnya di sektor pertambangan.

(*)

Disclaimer: Artikel ini bukan untuk mengajak, membeli, atau menjual saham. Segala rekomendasi dan analisa saham berasal dari analisis atau sekuritas yang bersangkutan, dan Kabarburas.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian investasi yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan investor. Pelajari dengan teliti sebelum membeli/menjual saham.

Sumber: kabarburas.com

Hanya Freeport yang Dipastikan Dapat Izin Ekspor Konsentrat Lagi

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa hanya PT Freeport Indonesia yang akan kembali mendapat izin ekspor konsentrat tembaga.

Pemberian rekomendasi izin ekspor tersebut seiring terjadinya kondisi kahar akibat insiden kebakaran smelter baru Freeport di Gresik, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Insiden itu menyebabkan Freeport belum bisa menyerap seluruh produksi konsentratnya untuk diolah di dalam negeri. Freeport pun kemudian kembali mengajukan izin ekspor.

Adapun, pemerintah telah mengantongi laporan dari kepolisian dan pihak asuransi terkait hasil investigasi terhadap insiden kebakaran smelter Freeport. Berdasarkan laporan tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan akan kembali memberikan izin ekspor bagi Freeport, tetapi dengan tarif bea keluar yang lebih tinggi.

Keberlangsungan operasi produksi Freeport dan pendapatan negara juga menjadi pertimbangan pemerintah.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak akan kembali memberikan izin ekspor kepada badan usaha lain yang izin ekspornya telah berakhir pada Desember 2024.

"Hanya Freeport saja," ujar Tri kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025) malam.

Selain Freeport, PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga meminta fleksibilitas atau perpanjangan ekspor konsentrat tembaga. Hal ini seiring proses commissioning smelter yang dibangun Perusahaan berjalan lebih lambat dari rencana.

Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau mengatakan, proses commissioning berjalan lambat lantaran pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi, smelter merupakan teknologi baru bagi Amman yang memang sangat berbeda dengan kemampuan Perusahaan sebagai penambang.

"Dengan itu kami juga berharap dapat diberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspor mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commissioning ini," ungkap Rachmat dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

Dia menjelaskan, saat ini, smelter yang dibangun oleh Amman baru mencapai kapasitas operasi sekitar 48%. Padahal, smelter yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat itu memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target produksi 220.000 ton katoda tembaga.

Adapun, Amman memulai proses commissioning sejak Juni 2024. Ini dilakukan setelah menyelesaikan tahap mechanical completion pada Mei 2024.

Namun, karena kompleksitas teknologi yang digunakan yakni menggabungkan teknologi dari Yanggu, China, serta beberapa penyedia lainnya seperti Merin dan Ototec, proses startup smelter mengalami kendala teknis.

"Tentunya tantangan teknis adalah tantangan yang terberat yang kami hadapi. Di mana kita rely pada pihak lain. Ini bukan teknologi yang memang sudah biasa buat kami," kata Rachmat.

Dengan kapasitas operasi yang masih di bawah target, Amman menilai relaksasi ekspor konsentrat tembaga akan membantu menjaga keseimbangan produksi dan operasional.

"Saat ini bisa saya sampaikan juga bahwa kami ada inventory sekitar 200.000 ton konsentrat yang sebenarnya bisa dijual kalau memang diizinkan untuk ekspor dan bisa dimaksimalkan juga untuk pendapatan negara," jelas Rachmat.

Smelter Freeport

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan bahwa kebakaran pada fasilitas common gas cleaning plant (CGCP) di smelter baru Freeport mengakibatkan kerusakan parah di west electro-static precipitation vessels, ducting, valves, instalasi kelistrikan, dan instrumentasi.

Dia menyebut, dari 3.500 item, 30% rusak dan perlu diganti. Sementara itu, 70% sisanya dapat

diperbaiki atau digunakan kembali.

Tony pun menargetkan perbaikan smelter bisa rampung pada Juni 2025 mendatang. Selain itu, kapasitas produksi bisa mencapai 100% pada Desember 2025.

"Kami yakin bisa selesai di minggu ketiga Juni dan mulai rampung minggu keempat Juni dengan kapasitas [produksi] 40%, Agustus 50%, September 60%, Oktober 70%, November 80%, baru 100% Desember," kata Tony dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

Lebih lanjut, Tony mengatakan, terbakarnya smelter membuat pihaknya mengajukan relaksasi ekspor konsentrat tembaga. Adapun, izin ekspor konsentrat tembaga PTFI telah berakhir pada 31 Desember 2024.

Tony menuturkan, belum terealisasinya izin ekspor seiring terbakarnya smelter, membuat stok konsentrat tembaga menumpuk di gudang penyimpanan Amamapare, Mimika, Papua. Selain itu, perusahaan juga telah menurunkan produksi konsentratnya sebesar 40%.

Dia menyebut terdapat potensi konsentrat tembaga 1,5 juta ton yang tidak dapat dimurnikan di dalam negeri karena dampak terhentinya operasi smelter. Tony mengklaim jika seluruh konsentrat tembaga itu bisa diekspor, negara bisa mendapat penerimaan dari dividen, pajak, bea keluar, dan royalti senilai US\$4 miliar atau sekitar Rp65 triliun.

"Kalau kita nilai dengan harga sekarang, nilainya bisa lebih dari US\$5 miliar. Di mana US\$5 miliar dolar itu berupa bea keluar, royalti, dividen, pajak perseroan badan akan bisa mencapai US\$4 miliar atau Rp65 triliun," kata Tony.

Tony menegaskan bahwa berdasarkan perjanjian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport, ekspor konsentrat dapat dilakukan apabila terjadi keadaan kahar. Namun, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri ESDM untuk mengatur ekspor karena keadaan kahar ini. (Lili Sunardi) Editor : Denis Riantiza Meilanova

Sumber: ekonomi.bisnis.com

Harga Batu Bara China Terus Merosot, Raksasa Pertambangan Terpaksa Pangkas Produksi

KEMEROSOTAN harga batu bara China kemungkinan akan berlangsung selama beberapa bulan yang berarti akan membebani pasar global.

Dikutip dari *Bloomberg*, Kamis 20 Februari 2025, raksasa pertambangan Glencore Plc terpaksa mempertimbangkan pemangkasan produksi setelah harga turun mendekati level terendah. China merupakan produsen dan konsumen batu bara terbesar global. Namun, saat ini China bekerja keras untuk menimbun bahan bakar tersebut untuk mencegah pemadaman listrik yang melumpuhkan ekonomi. Ekonomi China melemah dalam beberapa tahun terakhir.

Rekor produksi dan impor dalam negeri yang bertepatan dengan perlambatan ekonomi, menciptakan kelebihan pasokan dan mendorong harga batu bara pemanas lokal mendekati level terendah dalam empat tahun.

"Batu bara termal dapat menguji level terendah baru dalam jangka pendek," kata Li Xuegang, analis di Asosiasi Transportasi dan Distribusi Batu Bara China.

Penurunan harga kemungkinan akan mendinginkan minat negara tersebut terhadap impor.

Menurut Li, permintaan batu bara China hanya diharapkan pulih pada paruh kedua tahun ini jika pemerintah meningkatkan stimulus ekonomi. Itu pun kemungkinan akan terjadi ketika permintaan pendingin udara mencapai puncaknya, sehingga mendongkrak kebutuhan listrik.

Harga batu bara berjangka Newcastle Australia jatuh ke level terendah sejak 2021 minggu ini. Penurunan harga mungkin akan teredam jika perusahaan seperti Glencore mengurangi pasokan.

Saat ini, permintaan batu bara China mengalami penurunan. Analis memperkirakan harga batu bara spot akan turun di bawah level kontrak jangka panjang yang biasanya menjadi jangkar pasar.

Batu bara berkualitas rendah (lignit), yang biasanya dicampur dengan kadar yang lebih tinggi untuk meningkatkan nilai kalornya, akan mengalami pukulan terbesar.

Menurut Bloomberg Intelligence, pemasok batu bara kokas utama China, Mongolia, juga bermaksud untuk meningkatkan penjualan ke China hampir seperlimanya tahun ini, meskipun hal itu dapat merugikan Australia. Editor: Reni Erina

Sumber: rmiol.id

Koperasi Diizinkan Kelola Tambang

KEMENTERIAN Koperasi (Kemenkop) mengapresiasi pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Revisi ini, yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009, membuka peluang lebih luas bagi koperasi untuk turut mengelola tambang di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa beberapa pasal di dalam revisi UU Minerba—termasuk Pasal 51, 60, dan 75—secara eksplisit memberi kesempatan bagi koperasi untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

“Pada Pasal 51 disebutkan WIUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan, melalui mekanisme lelang atau pemberian prioritas,” jelas Budi Arie.

Menurut Budi Arie, kebijakan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, antara lain melalui lembaga berbasis kerakyatan seperti koperasi.

“Selama ini pengelolaan tambang banyak didominasi oleh korporasi, padahal konstitusi kita mengamanatkan agar sumber daya alam dikelola langsung oleh rakyat. Melalui koperasi, kita dapat mewujudkan hal tersebut,” ungkap Budi Arie.

Budi Arie menambahkan, pengesahan UU Minerba ini menjadi momentum penting bagi koperasi untuk berkontribusi lebih strategis dalam arus besar ekonomi masa depan Indonesia. Dengan masuknya koperasi ke dalam sektor pertambangan, bukan hanya kapasitas usaha koperasi yang meningkat, tapi juga kesejahteraan anggota dan masyarakat setempat.

“Keikutsertaan koperasi dalam mengelola tambang akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” papar Budi Arie.

Budi Arie menambahkan, “ini juga menjadi langkah konkret dalam mendorong asas keadilan dan kesetaraan bagi semua badan usaha, termasuk koperasi, untuk berperan dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.”

Budi Arie berharap ke depan semakin banyak koperasi yang tertarik dan mampu mengelola pertambangan di Indonesia. Dengan demikian, peran koperasi sebagai pilar demokrasi ekonomi dapat semakin kuat dan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

Gerakan Koperasi seluruh Indonesia wajib berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan DPR serta semua pihak yang telah membantu sehingga koperasi dapat berkiprah di sektor minerba. "Saatnya Koperasi Bangkit," ujar Budi Arie.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengapresiasi langkah awal DPR RI dalam mengusulkan revisi Undang-Undang Minerba. Menurut Bahlil, langkah ini sejalan dengan harapan Pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pertambangan minerba agar lebih baik lagi. Tujuan akhirnya adalah menjadikan sektor ini sebagai penggerak utama ekonomi, mempercepat industrialisasi berbasis pemanfaatan sumber daya alam, serta memastikan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil.

"Sejalan dengan prioritas pembangunan Kabinet Merah Putih yang tertuang dalam Asta Cita yaitu untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru serta melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri," ucap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil merincikan bahwa RUU Minerba yang disampaikan oleh DPR RI kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto diusulkan perubahan sebanyak 14 pasal dan selanjutnya Pemerintah membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebanyak 256 DIM.

"Dalam pembahasan yang lebih terperinci terdapat kesepakatan untuk menyempurnakan Undang-Undang baik mengubah Pasal yang telah ada maupun dengan menyisipkan pasal-pasal baru dengan hasil mengubah 20 Pasal dan penambahan 8 Pasal baru," imbuh Bahlil.

Dengan disahkannya RUU Minerba menjadi UU Minerba, Bahlil menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berdedikasi dalam proses pembentukannya. Bahlil menegaskan bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pertambangan, memberikan kepastian hukum dan berusaha, serta mendorong hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, UU Minerba diharapkan dapat berkontribusi dalam penciptaan

lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, dan yang terpenting, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan Indonesia serta kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat khususnya kepada Badan Legislasi DPR RI yang dengan penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian, serta kerjasama yang baik bersama Pemerintah dan DPD RI sehingga dapat menyelesaikan pembahasan RUU ini. Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Keahlian DPR RI, tenaga ahli, dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, masukan, pemikiran, dan perhatian terhadap penyempurnaan dan penyelesaian RUU ini," pungkas Bahlil.

Sumber: neraca.co.id